

Implikasi Politik Uang Terhadap Demokrasi Pancasila Pada Pemilu 2024 Terhadap Kesadaran Mahasiswa

Roulina Siburian^{1*}, Chyntia Dwi Camelia², Nurul Umami Lubis³, Rahel Octavia Siahaan⁴,
Juli Nola Olivia⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Medan, Indonesia

Article Info: Accepted: 11 November 2024; Approve: 30 November 2024; Published: 24 Desember 2024

Abstrak: Penelitian ini membahas kasus mahasiswa yang terlibat dalam praktik penerimaan suap atau politic money saat pemilihan umum (pemilu). Fenomena ini menjadi perhatian khusus mengingat peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, praktik politic money merujuk pada pemberian uang atau hadiah oleh kandidat atau partai politik kepada pemilih, termasuk mahasiswa, dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Studi kasus ini dilakukan dengan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam penerimaan suap pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa menerima politic money bervariasi, mulai dari alasan ekonomi hingga kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap demokrasi. Artikel ini menyoroti pentingnya edukasi politik dan penguatan etika pemilu di kalangan mahasiswa sebagai upaya untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik pendepolitic money. Kesimpulannya, partisipasi mahasiswa dalam politik harus didasarkan pada kesadaran dan integritas moral, bukan pada keuntungan materi jangka pendek.

Kata Kunci: Pemilu; Politik uang; Mahasiswa.

Abstract: *This study discusses the case of students involved in the practice of accepting bribes or political money during general elections. This phenomenon is of particular concern considering the strategic role of students as agents of social and moral change in society. In the context of elections, the practice of political money refers to the giving of money or gifts by candidates or political parties to voters, including students, with the aim of influencing their choices. This case study was conducted using qualitative methods, collecting data through interviews and observations of students involved in accepting election bribes. The results of the study indicate that students' motivations for accepting political money vary, ranging from economic reasons to a lack of understanding of the negative impacts of such actions on democracy. This article highlights the importance of political education and strengthening election ethics among students as an effort to prevent their involvement in the practice of depolitic money. In conclusion, student participation in politics must be based on moral awareness and integrity, not on short-term material gain.*

Keywords: Election; Money politics; Students.

Correspondence Author: Roulina Siburian

Email: roulinasiburian2305@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Pemahaman demokrasi dalam dunia pendidikan khususnya bagi masyarakat umum dalam tuntutan akademik dirasa masih tinggi. Demokrasi serta kebebasan dalam berbicara secara umum masih tergolong rendah. Di Indonesia, konsep demokrasi telah mengalami berbagai dinamika sejak kemerdekaan hingga saat ini. Salah satu bentuk demokrasi yang berkembang di Indonesia

adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai dan ideologi dasar negara Indonesia yang berakar pada Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara, menjadi landasan filosofis dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, keadilan sosial, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.

Fenomena politik uang dalam konteks Pemilu 2024 adalah praktik di mana kandidat atau partai politik memberikan uang, barang, atau bentuk insentif lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka. Dalam Pemilu, politik uang dapat terjadi sebelum hari pencoblosan, saat kampanye, atau bahkan di hari pemungutan suara itu sendiri.

Demokrasi Pancasila, yang merupakan implementasi demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan politik uang dalam beberapa prinsip utamanya yang pertama Kedaulatan Rakyat (Sila ke-4): Dalam Demokrasi Pancasila, kedaulatan berada di tangan rakyat. Politik uang mencederai kedaulatan ini karena pilihan rakyat bukan didasarkan pada kesadaran dan penilaian rasional, tetapi karena pengaruh uang atau materi. Yang kedua Keadilan Sosial (Sila ke-5): Politik uang memperburuk ketidakadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemilih yang kurang sejahtera menjadi target praktik ini dan sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih dengan bebas dan adil, karena mereka dipaksa oleh kebutuhan ekonomi. Yang ketiga Nilai Moral dan Etika (Sila ke-1): Politik uang mengabaikan aspek moral dan etika yang dijunjung dalam Demokrasi Pancasila, di mana pemilu seharusnya dilaksanakan secara jujur, bersih, dan adil, berdasarkan prinsip kebenaran, bukan manipulasi atau suap (*Gafuri, 2023*).

Pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu menangkap tangan 25 kasus politik uang yang dilakukan selama masa tenang. Kasus ini tersebar di 13 provinsi. Beragam jenis barang yang diberikan partai politik/kandidat kepada pemilih, seperti sembako, deterjen, dan uang tunai. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan batasan praktik politik uang dan bahaya yang ditimbulkannya menjadi salah satu penyebab berkembangnya praktik politik uang di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Kinerja KPK Semester I 2023 di Gedung KPK, mengatakan penyebab politik uang masih terus terjadi karena 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera dan lebih dari 50 persen dengan tingkat pendidikannya belum baik (*Begouvic, 2021*).

Pada Pemilu 2024, praktik politik uang diperkirakan akan tetap menjadi salah satu isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian. Tidak hanya berdampak pada legitimasi hasil pemilu, tetapi juga terhadap kesadaran politik masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa, sebagai bagian dari kelompok terdidik dan agen perubahan sosial, diharapkan memiliki peran signifikan

dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesadaran politik mahasiswa sering kali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan politik yang ada, termasuk praktik politik uang.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana implikasi politik uang terhadap Demokrasi Pancasila, khususnya pada Pemilu 2024, serta dampaknya terhadap kesadaran politik mahasiswa. Analisis terhadap hal ini menjadi penting guna menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Kajian Teori

1. Pemilu

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung oleh masyarakat. Pemilu menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Pemilu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang legitimasi, demokratis, dan sesuai dengan kehendak rakyat. Namun, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik politik uang yang mengancam integritas dan kualitas demokrasi (Saputra et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pemilu.

2. Politik Uang

Politik uang merujuk pada praktik memberikan atau menerima uang atau bentuk imbalan lainnya untuk memengaruhi keputusan politik, termasuk dalam konteks pemilu. Menurut Pasal 73 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, politik uang merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Politik uang tidak hanya mengikis integritas proses demokrasi tetapi juga menumbuhkan budaya transaksional yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa politik uang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan menciptakan pandangan pragmatisme politik di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa (Zain et al., 2021).

3. Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi dan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Mahasiswa diharapkan menjadi pelopor dalam membangun kesadaran politik masyarakat melalui pemahaman kritis tentang demokrasi. Namun, fenomena politik uang yang melibatkan mahasiswa menunjukkan adanya ancaman terhadap idealisme mereka sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai kelompok

intelektual, mahasiswa harus mampu berkontribusi dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi (Arifin, 2021). Pendidikan politik yang berkelanjutan dan penguatan moralitas di kalangan mahasiswa menjadi langkah penting untuk membangun generasi muda yang sadar akan pentingnya integritas dalam demokrasi.

Metode

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan mahasiswa terkait politik uang dalam konteks demokrasi Pancasila pada Pemilu 2024. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan etika penelitian. Data dianalisis secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari pola-pola temuan yang muncul dari hasil wawancara.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di beberapa Fakultas Universitas Negeri Medan, diantaranya Fakultas Ilmu dan Bahasa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Olahraga di dapat hasil bahwa masih banyak mahasiswa Universitas Negeri Medan yang tidak mengetahui dan menolak untuk menerima uang suap saat pemilu berlangsung, namun demikian, masih terdapat beberapa mahasiswa diantaranya di Fakultas Bahasa dan Seni yang mengaku menerima dengan sadar uang suap yang ada saat pemilihan umum berlangsung.

Hal ini membuktikan bahwa fenomena money politic ini telah berlangsung tidak hanya dikalangan masyarakat dewasa, namun juga dikalangan Mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata. Namun, masih banyak ditemukan mahasiswa berpartisipasi pada politik uang. Mahasiswa merupakan seseorang yang menempuh maupun sedang menempuh pendidikan diperguruan tinggi. Hal tersebut akan menambah pengetahuan yang lebih pada mahasiswa. Namun demikian, berdasarkan hasil yang telah di dapat saat melakukan wawancara secara langsung, Mahasiswa tersebut secara sadar mau dibeli suaranya dengan uang suap saat pemilu berlangsung.

Politik uang merupakan suatu bentuk penyuapan seseorang yang dapat berupa barang, uang, dan lain sebagainya, agar tidak menjalankan hak nya untuk memilih seseorang kandidat pada saat pemilihan umum. Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 menjelaskan mengenai individu pada pemilhan umum yang melakukan janji menyuap, akan dikenai pidana

dengan hukuman penjara paling selama 3 tahun. Pidana tersebut diberikan kepada pemberi dan penerima janji suap pada saat pemilu. (Zain, dkk, 2021).

Dari perspektif mahasiswa, politik uang bisa sangat merusak kesadaran mereka tentang pentingnya integritas dalam demokrasi. Mahasiswa adalah agen perubahan yang seharusnya kritis terhadap penyimpangan dalam proses politik. Jika mahasiswa terpengaruh atau terbiasa dengan praktik politik uang, hal ini dapat mengikis nilai-nilai idealisme yang mereka pegang, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, politik uang dapat menumbuhkan sikap apatis dan pragmatisme yang berlebihan, di mana kepentingan jangka pendek (seperti keuntungan material) lebih diutamakan daripada nilai-nilai luhur demokrasi.

Politik uang juga dapat membuat mahasiswa melihat demokrasi sebagai sesuatu yang transaksional, di mana keputusan politik diambil berdasarkan uang atau keuntungan materi, bukan berdasarkan pemikiran kritis atau kepentingan rakyat. Hal ini pada akhirnya melemahkan integritas demokrasi itu sendiri dan menurunkan kualitas partisipasi politik di kalangan mahasiswa, yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat luas. Untuk itu, penting bagi mahasiswa untuk tetap menjaga idealisme dan berperan aktif dalam mengkritisi serta melawan praktik politik uang, sehingga nilai-nilai demokrasi Pancasila tetap tegak dan proses politik berlangsung secara adil dan bermartabat. Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya politik uang peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diterapkan:

a. Pendidikan Politik yang Berkelanjutan

- a) Integrasi dalam Kurikulum: Memasukkan materi tentang bahaya politik uang dan dampaknya dalam mata kuliah, terutama yang terkait dengan ilmu politik, hukum, ekonomi, dan etika. Ini dapat dilakukan melalui studi kasus, diskusi, dan debat untuk meningkatkan pemahaman kritis.
- b) Pelatihan Kepemimpinan dan Diskusi Publik: Mengadakan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada integritas, transparansi, dan dampak negatif politik uang. Selain itu, diskusi publik yang melibatkan pakar dapat memperdalam pemahaman tentang isu ini.
- c) Pendidikan Nilai Etika: Mengajarkan pentingnya nilai-nilai etika dalam berpolitik dan pengambilan keputusan. Kampanye tentang tanggung jawab moral mahasiswa sebagai generasi pemimpin masa depan bisa menjadi dorongan kuat untuk menghindari praktik politik uang.

b. Kampanye Anti-Korupsi

- a) Sosialisasi dan Seminar: Mengadakan seminar anti-korupsi dengan narasumber dari lembaga anti-korupsi atau organisasi non-pemerintah yang aktif di bidang ini. Seminar ini bisa diisi dengan topik tentang bagaimana politik uang berkontribusi pada korupsi sistemik.

- b) **Media Sosial dan Platform Digital:** Memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye anti-politik uang. Melalui video edukasi, infografis, dan konten visual lainnya, pesan anti-korupsi dapat lebih mudah diterima oleh mahasiswa.
- c) **Penggunaan Influencer Kampus:** Mahasiswa yang memiliki pengaruh (influencer) di kampus bisa diajak berkolaborasi untuk mengampanyekan bahaya politik uang melalui media sosial dan acara kampus. Ini efektif untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa dengan cara yang lebih akrab dan mudah dipahami.
- c. **Simulasi Pemilu dan Partisipasi Demokratis**
 - a) **Simulasi Pemilu:** Mengadakan simulasi pemilu di kampus yang berintegritas tanpa adanya politik uang. Hal ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang pentingnya demokrasi yang bersih.
 - b) **Gerakan Mahasiswa Anti-Korupsi:** Membentuk kelompok atau gerakan mahasiswa yang fokus pada advokasi anti-korupsi. Kelompok ini dapat menjadi platform untuk mengkritisi praktik politik uang di level kampus maupun luar kampus.
 - c) **Kolaborasi dengan Lembaga Anti-Korupsi:** Mengadakan kerja sama dengan lembaga seperti KPK, ICW, atau organisasi anti-korupsi lainnya untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada mahasiswa.
- d. **Penelitian dan Karya Ilmiah**
 - a) **Penelitian Tentang Politik Uang:** Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian ilmiah tentang dampak politik uang terhadap demokrasi dan pembangunan bangsa. Penelitian ini bisa menjadi referensi penting dan juga meningkatkan kesadaran mereka melalui kajian akademis.
 - b) **Lomba Karya Tulis dan Video Edukatif:** Mengadakan kompetisi menulis atau membuat video yang mengangkat tema tentang bahaya politik uang, dengan hadiah sebagai insentif. Kompetisi semacam ini bisa memacu kreativitas dan mendorong mahasiswa untuk menyuarakan pandangan mereka.
- e. **Keterlibatan dalam Aksi Nyata**
 - a) **Gerakan Sosial dan Kampanye Aksi:** Mahasiswa dapat terlibat dalam gerakan sosial atau kampanye aksi di masyarakat yang berfokus pada penolakan politik uang. Keterlibatan langsung ini dapat memberikan mereka pengalaman nyata dalam memberantas praktik tersebut.

- b) Partisipasi dalam Pemantauan Pemilu: Mendorong mahasiswa untuk terlibat sebagai pemantau pemilu, baik melalui organisasi kampus atau lembaga resmi, untuk melihat langsung bagaimana proses pemilu berjalan dan mencegah adanya praktik politik uang.

Implikasi politik uang terhadap masa depan demokrasi Pancasila di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Politik uang tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi juga mengancam esensi dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Sebagai sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong, Demokrasi Pancasila seharusnya mendorong partisipasi politik yang bersih dan jujur. Namun, praktik politik uang memperlihatkan kecenderungan mereduksi nilai-nilai tersebut, menjadikan politik sebagai alat transaksi, bukan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Jika politik uang terus dibiarkan, kualitas pemimpin yang dihasilkan akan semakin merosot, hanya merepresentasikan kepentingan pihak-pihak dengan modal besar, bukan kepentingan rakyat secara umum. Hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Untuk itu, langkah-langkah tegas dan konsisten perlu diambil oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga penegak hukum, untuk memerangi praktik politik uang. Hanya dengan demikian, Demokrasi Pancasila dapat tetap bertahan dan berkembang sebagai fondasi yang kokoh bagi Indonesia di masa depan.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Medan, sebagian besar mahasiswa menyatakan penolakan terhadap praktik politik uang selama pemilu. Namun, masih terdapat mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni yang mengaku secara sadar menerima uang suap tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya terbatas pada masyarakat umum tetapi juga melibatkan mahasiswa, yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara idealisme mahasiswa sebagai generasi intelektual dengan praktik pragmatis yang justru melemahkan integritas demokrasi.

Sebagai kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman kritis tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, beberapa mahasiswa tampak lebih mementingkan keuntungan material jangka pendek dibandingkan dengan nilai luhur demokrasi. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Zain et al. (2021), yang menyatakan bahwa politik uang cenderung mengurangi kesadaran individu terhadap pentingnya partisipasi politik yang bersih dan bertanggung jawab.

Praktik politik uang ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan gotong royong. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengikis

idealisme mahasiswa dan memperburuk kualitas demokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Pasal 73, baik pemberi maupun penerima uang suap dapat dikenai hukuman pidana. Fakta bahwa mahasiswa, sebagai generasi terdidik, tetap terlibat dalam praktik ini menunjukkan lemahnya pendidikan politik dan kurangnya kesadaran kritis terhadap bahaya politik uang.

Dalam perspektif lain, politik uang tidak hanya menciptakan budaya pragmatisme tetapi juga mengubah persepsi mahasiswa terhadap demokrasi menjadi sesuatu yang transaksional. Hal ini sejalan dengan pandangan Saputra et al. (2020), yang menyebutkan bahwa politik uang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menciptakan ketergantungan pada kekuatan ekonomi dalam menentukan pemimpin.

Untuk mengatasi fenomena ini, langkah-langkah strategis perlu dilakukan. Pendidikan politik berbasis kurikulum, kampanye anti-korupsi, simulasi pemilu yang bersih, penelitian ilmiah, dan keterlibatan mahasiswa dalam aksi nyata menjadi solusi yang dapat diterapkan. Misalnya, integrasi materi bahaya politik uang dalam mata kuliah dan pelaksanaan simulasi pemilu tanpa politik uang di kampus dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang demokrasi yang sehat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga seperti KPK dapat memberikan mahasiswa wawasan lebih dalam tentang dampak destruktif politik uang terhadap pembangunan bangsa.

Kesimpulan

Kesadaran mahasiswa tentang politik uang pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa secara umum memahami dampak negatif politik uang terhadap demokrasi, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang terpengaruh oleh praktik ini. Mahasiswa, sebagai segmen masyarakat yang diharapkan lebih kritis dan idealis, menunjukkan variasi dalam tingkat kesadaran. Sebagian besar mengakui bahwa politik uang dapat merusak kualitas pemilu dan kepemimpinan yang dihasilkan. Namun, terdapat pula yang masih mengisyaratkan pragmatis, memandang politik uang sebagai bagian yang tak terelakkan dalam praktik politik.

Penelitian ini juga mengungkapkan perlunya peningkatan pendidikan politik yang lebih intensif di kalangan pelajar, baik melalui jalur formal maupun nonformal, untuk memperkuat pemahaman dan komitmen mereka terhadap demokrasi yang bersih dan berintegritas. Upaya ini penting guna memastikan bahwa generasi muda, khususnya pelajar, mampu berperan dalam pengawalan demokrasi Pancasila yang bebas dari pengaruh politik uang pada masa mendatang. Kesadaran mahasiswa tentang politik uang masih memerlukan penguatan, terutama dalam konteks mempertahankan idealisme demokrasi Pancasila. Pendidikan politik yang lebih efektif

dan kampanye anti-politik uang harus menjadi prioritas untuk mendorong partisipasi pelajar dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Referensi

- Arifin, M. (2021). Pendidikan Politik dan Peran Mahasiswa dalam Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(3), 121-135.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia. *Jurnal Riset dan Penelitian*, 4(2), 105-122.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.
- GAFURI, A. (2023). Peran Nilai-Nilai Pancasila dalam Membendung Praktek Politik Uang di Pemilu dan Pemilihan. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 14(1), 1-8.
- Saputra, D., et al. (2020). Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Pemilih di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 12(1), 45-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Zain, M., et al. (2021). Politik Uang dan Dampaknya terhadap Kesadaran Demokrasi Mahasiswa. *Jurnal Etika Politik*, 9(2), 34-49.
- Zain, S. S., & Fauzi, A. M. (2021). Rasionalitas Mahasiswa Dalam Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa Kenep. *Jurnal Hukum Tora*, 7(2), 299-305.